

ABSTRAK

Mega Thohira *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.* Skripsi, Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. Pembimbing 2 : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan BUMDes

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki Desa sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Desa untuk pembangunan perekonomian desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 87 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES*”. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberhasilan suatu desa harus didorong dengan memperluas ekonomi desa, melalui berbagai latihan bisnis keuangan pedesaan. Pemerintah Desa Pulau Kerumputan mendirikan BUMDes pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan nama BUMDes Karya Pulau yang berdasarkan pada peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembentukan dan pengelolaan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sedangkan Objek penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Pulau Kerumputan dalam pengelolaan BUMDes Karya Pulau dari sisi pengorganisasian maupun perencanaan unit-unit usaha telah dilaksanakan dengan baik namun dari segi pengarahan atau penggerakan dan pengawasan kinerja masih kurang optimal, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Karya Pulau yaitu kurangnya sosialisai dan komunikasi serta kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa pada Pengurus Oprasional BUMDes.